



PROFIL

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si



PROFIL

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si

VISI DAN MISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

➤ ***VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU***

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.

➤ ***MISI KE-5 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU***

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir

➤ ***TUJUAN***

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau

➤ ***SASARAN***

Percepatan pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

➤ ***IKU***

Terealisasinya kegiatan rencana induk pengelola perbatasan (35%)

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :**

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, Koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kembali berkiprah sebagai organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian direvisi dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2023, setelah sebelumnya berdiri di tahun 2011 hingga di akhir tahun 2016 dan kemudian tugas dan fungsinya berada di Biro Pemerintahan dan Perbatasan pada Sub Bagian Perbatasan Antar Negara.





BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan pengelolaan perbatasan. Dengan kewenangan tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan perbatasan sehingga tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga perbatasan menjadi beranda terdepan negara.



BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENYELENGARAKAN FUNGSI BERIKUT:



01

Penyusunan kebijakan disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

02

Pelaksanaan tugas dukungan teknis disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

03

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi



BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENYELENGARAKAN FUNGSI BERIKUT:



04

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

05

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub-bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KONDISI PEGAWAI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pejabat Eselon II	1 Orang
2.	Pejabat Eselon III	3 Orang
3.	Pejabat Eselon IV	1 Orang
4.	Fungsional	8 Orang
5.	Staf Pelaksana	8 Orang
6.	PTT	3 Orang
7.	PHL	5 Orang
JUMLAH PEGAWAI		29 Orang



BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MEMBAWAHI :

SEKRETARIAT

***BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN DAN
FASILITASI KERJA SAMA***

***BIDANG KOORDINASI
PELAKSANAAN***

***BIDANG MONITORING
DAN EVALUASI***



CURICULUM VITAE

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



CURICULUM VITAE



Nama : Drs. H. Doli Boniara, M.Si
NIP : 197207101992011003
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Madya / IV.d
Tempat / Tanggal Lahir : Bogor / 10 Juli 1972
Status Keluarga : Menikah (1 Orang Istri, 2 Orang Anak)

Nama Istri : Nelly Huzrin Hood, B.Mgt
Nama Anak : 1. Sultan Firman Rahmat Ramadhan
2. Muhammad Laksmana Lukmanul Hakim

- PENDIDIKAN**
- SD** SD NEGERI 008 KAMPUNG MELAYU PEKANBARU TAHUN LULUS 1985
 - SMP** SMP NEGERI 4 PEKANBARU TAHUN LULUS 1988
 - SMA** SMA NEGERI 1 PEKANBARU TAHUN LULUS 1991
 - S1** POLITIK PEMERINTAHAN, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) TAHUN LULUS 1999
 - S2** ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN LULUS 2004

RIWAYAT JABATAN / PENUGASAN

1. Staf Biro Penyusunan Program Prov Riau (1994-1995)
2. Kasubsi Ekonomi Produksi Kecamatan Moro Kabupaten Kepri (1995-1996)
3. Seklur Meral Kecamatan Karimun Kabupaten Kepri (1996-1997)
4. Kasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kab Karimun (1999)
5. Kabag TU Satpol PP Kota Tanjungpinang (2005)
6. Kabag TU Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang (2006)
7. Camat Karimun (2007)
8. Kabag Pemerintahan Kabupaten Karimun (2009)
9. Kasatpol PP Kabupaten Karimun (2009)
10. Sekdis Koperasi dan UKM Karimun (2010)
11. Karo Pemerintahan Provinsi Kepri (2010)
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau (2014)
13. Pejabat Bupati Bintan (2015-2016)
14. Kepala Dinas Sosial Prov Kepri (2016-2021)
15. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2021-Sekarang)



TERIMA KASIH

